

STRATEGI RAYA NEGARA TRADISIONAL DI NUSA TENGGARA: TINJAUAN SEJARAH

TRADITIONAL STATE STRATEGIES IN NUSA TENGGARA: A HISTORICAL REVIEW

Hariyono*, Daya Negri Wijaya, Deny Yudo Wahyudi

Universitas Negeri Malang

Jalan Semarang Nomor 5 Malang 65145, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima : 17 Desember 2024

Disetujui : 26 Februari 2025

Keywords:

grand strategy; diplomacy;
colonialism; traditional state

Kata Kunci:

strategi raya; diplomasi;
kolonialisme; negara tradisional

***) Korespondensi:**

E-mail: hariyono.fis@um.ac.id

Abstract: this article aims to analyze the political and governmental strategies implemented by traditional states in Nusa Tenggara in dealing with internal and external dynamics in the past. This study discusses the patterns of adaptation and political maneuvers carried out by local kingdoms such as Larantuka and Lombok in maintaining sovereignty, while managing relations with external powers, including European colonialism and regional trade networks. The approach used is historical-critical to identify the strategies applied in military power, diplomacy, strategic alliances, and traditional bureaucratic reforms to enhance the effectiveness of governance. The findings reveal that cultural adaptability and the utilization of local resources are key factors in the success of traditional states in the archipelago. The contribution of this study is providing an understanding of regional political history and its relevance in the context of managing local autonomy today.

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis strategi politik dan pemerintahan yang diterapkan oleh negara tradisional di Nusa Tenggara, dalam menghadapi dinamika internal maupun eksternal pada masa lampau. Kajian ini membahas pola adaptasi dan manuver politik yang dilakukan oleh kerajaan lokal seperti Larantuka dan Lombok dalam mempertahankan kedaulatan, sekaligus mengelola hubungan dengan kekuatan luar termasuk kolonialisme Eropa dan jaringan perdagangan regional. Pendekatan yang digunakan yaitu historis-kritis untuk menemukan strategi yang diterapkan pada kekuatan militer, diplomasi, aliansi strategis, serta reformasi birokrasi tradisional untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kekuatan adaptasi budaya dan pemanfaatan sumber daya lokal menjadi faktor kunci keberhasilan negara-negara tradisional di nusantara. Kontribusi dari adanya kajian ini yaitu memberikan pemahaman sejarah politik regional dan relevansinya dalam konteks pengelolaan otonomi lokal di masa kini.

PENDAHULUAN

Strategi raya (*grand strategy*) berkaitan erat dengan ketahanan politik. Strategi raya merupakan konsep yang tidak hanya mencakup kekuatan militer suatu negara tetapi juga aspek diplomasi dan birokrasi politik untuk mengantisipasi ancaman eksternal, mempertahankan kekuasaan, serta memperoleh keuntungan ekonomi (Wulandari, 2020). Strategi raya memiliki posisi yang sangat penting bagi ketahanan politik suatu negara. Ketahanan politik dapat dilihat dari berbagai aspek seperti institusionalisasi dan konsolidasi

partai politik (Agustino, Sylviana, & Silas, 2023), komunikasi politik dan pemasaran politik partai (Adam, 2021; Alayya, 2023; Firmansyah, 2020; Hayati dkk., 2022; Majid, 2023; Nasution dkk., 2023; Sutrisno, Yuningsih, & Agustino, 2018), serta pendidikan politik bagi pemilih pemula (Afhiani, Elyta, & Apriyani, 2024; Fernandes dkk., 2023). Ketiga aspek tersebut menjadi fokus dari strategi raya meskipun belum banyak yang membahas tentang kekuatan militer, diplomasi, dan birokrasi politik suatu negara. Strategi raya yang komprehensif dapat memperkuat ketahanan

politik, sebaliknya ketahanan politik yang kuat dapat mendukung implementasi strategi raya yang efektif.

Strategi raya secara umum didefinisikan sebagai pendekatan komprehensif dan jangka panjang yang digunakan oleh suatu negara untuk mencapai tujuan atau kepentingan nasional di kancah internasional. Oleh karena itu, kajian terdahulu terkait strategi raya suatu negara cenderung membahas kebijakan luar negeri (Bajri & Akim, 2021; Hutabarat, 2022; Iskandar, Ambarwati, & Putra, 2022; Rudiany & Lubis, 2020), kerja sama internasional (Delanova & Yani, 2021; Hakiem & Susilowati, 2020; Simatupang, Oktaviani, & Novialdi, 2023), pengelolaan utang luar negeri (Agustino, Sylviana, & Silas, 2023; Octavianti & Budyanra, 2023; Sucipto & Puspitasari, 2016), serta perlindungan warga negara di luar negeri (Dewi, Arini, & Suryani, 2021; Faisal dkk., 2023; Meganingratna & Nur, 2022). Kajian terdahulu yang membahas strategi raya suatu negara dari perspektif sejarah cenderung sedikit. Peneliti terdahulu telah mengkaji Polis Athena (Strassler, 2008), Kekaisaran Romawi (Luttwak, 1979), Kekaisaran Romawi Timur (Luttwak, 2009), Kekaisaran Habsburg, Kerajaan Sriwijaya (Wulandari, 2020), serta Kesultanan Melaka (Wey & Harun, 2018; Wulandari, 2020). Topik strategi raya negara tradisional belum banyak dibahas menjadi kajian utama dalam historiografi Indonesia. Oleh karena itu, untuk melengkapi literatur yang ada kajian ini berfokus pada strategi raya negara tradisional di Nusa Tenggara yang lebih spesifik pada lokus Lombok dan Larantuka.

Nusa Tenggara sebagai wilayah yang strategis mengundang semua pihak untuk berkuasa, bukan hanya kekuatan lokal tetapi juga kekuatan asing, yang saling berseteru dan saling berkoalisi untuk mencapai kepentingan bersama. Islamisasi Lombok terjadi setelah Sunan Prapen dan bala pasukannya berhasil menguasai sekaligus menyebarkan agama Islam kepada Raja dan masyarakat lokal, terutama di Labuan Lombok pada abad XVI. Sunan Prapen dari Lombok meneruskan dakwahnya ke Sumbawa. Kerajaan Islam Lombok berpusat di Selaparang di bawah pemerintahan Prabu Rangkesari. Selaparang pada masa itu berada di zaman kejayaan karena berhasil memegang hegemoni di seluruh wilayah Lombok. Selaparang memiliki beberapa bandar di pantai utara dan

timur Lombok, menjalin hubungan dengan beberapa negeri terutama Demak, serta banyak didatangi oleh pedagang dari berbagai pelosok negeri (Abdulah, Azra, & Burhanudin, 2011; Poesponegoro & Notosusanto, 2008). Pedagang membawa berbagai komoditas terutama tekstil dan rempah-rempah untuk ditukar dengan produk lokal seperti kerbau dan beras (Jamaluddin, 2021). Nusa Tenggara sebagai salah satu daerah dengan kondisi geografis yang cukup strategis membuat banyak pihak tertarik untuk menguasai wilayah ini.

Kedaulatan Lombok mulai meredup akibat penetrasi asing yang terjadi di Nusa Tenggara, terutama pasca Perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Kongsi Dagang Belanda atau *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) menyerang dan memaksa Makassar untuk mendukung monopoli VOC. Hal ini menyebabkan Makassar tidak mampu lagi melindungi Kedatuan Selaparang (Poesponegoro & Notosusanto, 2008). VOC juga terus menginvasi Bima, sepanjang abad XVII Bima harus mengikuti kehendak VOC termasuk intervensi politik dan monopoli perdagangan di wilayah tersebut. VOC membangun Benteng Asakota yang terletak di sisi barat Teluk Bima. Benteng tersebut dibangun pada tahun 1667 yang berfungsi sebagai pertahanan Belanda untuk Bima. Rakyat Bima sempat memberontak dan pada puncaknya Sultan Bima tidak bersedia untuk memperpanjang kontrak kesepakatan dengan VOC. Hal ini yang melatarbelakangi Sultan Bima diasingkan dan kendali Bima berada ditangan VOC. Kemarahan rakyat Bima menjadi motivasi perlawanan kepada VOC sepanjang abad XVIII (Abdulah, Azra, & Burhanudin, 2011; Poesponegoro & Notosusanto, 2008). Kedaulatan kerajaan tradisional di wilayah ini pada akhirnya terampas, namun kerajaan di Lombok masih mampu untuk mengakomodasi tata kelola asing agar dapat bertahan.

Larantuka mengalami hal yang sama dengan Lombok. Larantuka menjadi tempat bergantung setelah Portugis kehilangan Malaka dan Makassar. Portugis menjadikan Larantuka sebagai pusat politik dan perdagangan di Nusa Tenggara sejak tahun 1620-an. Portugis diterima dengan baik oleh elit Larantuka karena memberikan perlindungan bagi Larantuka yang sedang diserbu oleh pasukan Islam dari Jawa dan sekutunya. Kerajaan Larantuka menggunakan sistem Portugis dan Katolik dalam menjalankan

pemerintahannya (Boxer, 1968; Lobato, 1999; Matos, 1995; Villiers, 1994). Berdasarkan paparan yang telah diuraikan sebelumnya, kajian ini membahas tentang diskursus strategi raya, sistem dan birokrasi politik negara tradisional di Nusa Tenggara, perkembangan politik dan strategi raya negara tradisional di Lombok, serta perkembangan politik dan strategi raya Kerajaan Larantuka.

METODE

Kajian ini menggunakan metode penelitian historis yang berupaya merekonstruksi strategi raya negara tradisional di Lombok dan Larantuka. Topik yang dibahas dalam kajian ini yaitu sistem dan birokrasi politik serta strategi raya negara tradisional di Nusa Tenggara. Kajian ini memungkinkan untuk dilakukan karena ketersediaan literatur yang begitu melimpah. Keberadaan kronik lokal seperti Babad Lombok dapat digunakan untuk merekonstruksi sejarah politik di Lombok pada kurun niaga. Keberadaan arsip serta kronik Portugis dan Belanda juga dapat melengkapi informasi terkait perkembangan negara tradisional di Nusa Tenggara. Keberagaman sumber tersebut dapat dikaji lebih lanjut melalui analisis secara mendalam dengan penuh ketelitian. Perbedaan perspektif dapat membuat informasi menjadi rancu, sehingga membutuhkan adanya verifikasi silang antar sumber sejarah yang diperoleh. Hal ini dilakukan bukan hanya sekadar meminimalisir subjektivitas tetapi bertujuan untuk mendalami berbagai perspektif sehingga dapat membantu dalam memahami suatu peristiwa. Pada posisi ini verifikasi menempati posisi yang penting terutama ketika memilih dan membandingkan informasi dari berbagai sumber. Hal ini secara tidak langsung bertujuan untuk menganalisis atau menginterpretasikan suatu peristiwa. Sintesis sebagai hasil berpikir akan terwujud apabila telah dituangkan dalam bentuk tulisan yang disusun dengan gaya sastrawi. Oleh karena itu, historiografi yang dihasilkan akan lebih mudah dibaca dan dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskursus Strategi Raya

Strategi raya dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kesuksesan dan kegagalan dari kekuatan suatu negara. Strategi raya dapat dipahami secara teoretis maupun praktis (Wey

& Harun, 2018). Strategi raya diharapkan dapat menjadi jembatan penghubung tujuan ekonomi, politik, dan militer untuk mempertahankan kepentingan negara dalam jangka panjang (Starr, 1993). Strategi raya dapat memandu dan memberikan keputusan untuk melakukan interaksi dengan pihak internal maupun eksternal dalam sistem pemerintahan internasional (Onea, 2020). Strategi raya dapat dipahami sebagai prinsip atau gambaran berupa visi, ide, dan desain utama dari suatu negara.

Strategi raya secara praktis dapat memanfaatkan diplomasi atau tata negara dengan didukung oleh kekuatan militer untuk menghadapi dan mengatasi ancaman eksternal. Strategi ini bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan, mendapatkan keuntungan ekonomi, dan memperluas pengaruh (Wey & Harun, 2018). Tujuan utama strategi raya terletak pada kebijakan negara. Kebijakan yang dimaksud adalah kapasitas pemimpin kekuasaan atau negara dalam menyatukan seluruh elemen non-militer dan militer untuk mencapai kepentingan negara serta menjamin kesejahteraan dan keberlangsungan negara baik saat kondisi damai maupun perang. Keseluruhan elemen ini meliputi implementasi dan penilaian diplomasi; pemenuhan kepentingan negara; budaya politik; moral; serta sumber daya ekonomi yang meliputi sektor industri, sumber daya alam, keuangan, tenaga kerja, dan militer (Starr, 1993). Strategi raya bertujuan untuk mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat mengganggu stabilitas pada berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Strategi raya di nusantara, terutama pada periode pra-kolonial, telah banyak digunakan oleh beberapa kerajaan dan kesultanan untuk mencapai kepentingan dan tujuan politiknya. Sriwijaya menjadi model negara tradisional yang menggunakan strategi raya untuk menjadi kerajaan adidaya. Keadaan geopolitik dan geoekonomi di Selat Malaka dianggap sebagai ancaman bagi Sriwijaya khususnya untuk kawasan pesisir utara Sumatera. Pada masa ini pelabuhan-pelabuhan di Palembang dan Jambi menjadi jalur penghubung kegiatan perdagangan antara wilayah nusantara bagian barat dengan bandar dagang Asia. Hal ini menjadikan Kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan dengan para pedagang China (Wolters, 1967). Kerajaan Sriwijaya pada tahun 682 bersaing dengan Jambi untuk memperebutkan jalur perdagangan Sungai

Batang Hari. Persaingan ini dimenangkan oleh Kerajaan Sriwijaya sehingga mampu menguasai jalur perdagangan internasional sekaligus wilayah Jambi. Wilayah kekuasaan Sriwijaya rentan terhadap pemberontakan dari wilayah pedalaman dan serangan pihak eksternal (Hall, 1985). Oleh karena itu, para penguasa Sriwijaya menggagas kebijakan militer secara defensif untuk melindungi keseluruhan kepentingan kerajaan (Wolters, 1967). Kerajaan di nusantara pada masa pra-kolonial telah banyak yang menerapkan strategi raya untuk mencapai kepentingan politik.

Kerajaan Majapahit dibawah kendali Patih Gajah Mada berhasil menggunakan strategi raya untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga mencakup sebagian kawasan di Asia Tenggara (Manggala, 2013). Eksistensi kekuatan politik Kerajaan Majapahit dapat dilihat ketika Raja Hayam Wuruk berkuasa pada abad XIV dan abad XV. Pada masa itu Majapahit seringkali mengirim utusan dan armada militer di berbagai kawasan nusantara dengan tujuan hubungan perdagangan, diplomasi, dan penaklukan wilayah. Kerajaan Majapahit juga menjalin hubungan ekonomi-politik dengan kerajaan maupun negara di kawasan Asia Tenggara untuk kepentingan kerajaan yang berkelanjutan (Munandar, 2020). Strategi raya digunakan oleh Kerajaan Majapahit untuk memperluas wilayah kekuasaan hingga ke kawasan Asia Tenggara.

Kesultanan Malaka pada abad XV menjadi pusat peradaban Islam yang menyebarkan pengaruhnya ke seluruh Kepulauan Melayu. Pada periode ini, Sultan Mahmud Syah sebagai Sultan terakhir Malaka membuat kebijakan politik dengan tujuan melegitimasi wilayah Malaka menjadi Mekkah Baru. Hal ini dilatarbelakangi oleh pengaruh Malaka pada saat itu yang menjadi pusat perdagangan internasional selama abad XV. Sultan Malaka juga membuat kebijakan hukum laut Malaka dengan tujuan menjaga harmoni sosial di Malaka dan melindungi perdagangan Malaka dari ancaman eksternal, termasuk Portugis (Wijaya, 2022). Kesultanan Malaka menerapkan konsep strategi raya pada sistem pemerintahannya untuk menyebarluaskan pengaruh ke Kepulauan Melayu.

Kesultanan Aceh juga menerapkan konsep strategi raya pada sistem pemerintahannya ketika dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Kesultanan Aceh mengalami masa

kejayaan pada abad XVII. Hal ini tidak terlepas dari peran dan pengaruh dari Sultan Iskandar Muda. Sultan dipercaya telah menciptakan perubahan dan keberhasilan signifikan ketika melawan Portugis di Malaka. Sultan menyusun kebijakan perundang-undangan niaga yang inklusif dan perluasan wilayah ke seluruh Kepulauan Melayu. Masa kejayaan Kesultanan Aceh merupakan fakta sejarah karena Sultan Iskandar Muda mampu menjadikan Banda Aceh sebagai kota kosmopolitan serta mampu mentransformasikannya menjadi kota maritim (Lombard, 1986). Kesultanan Aceh pada abad XVII dianggap sebagai kekuatan baru pada segi politik, ekonomi, dan militer di kawasan nusantara.

Kesultanan Mataram Islam yang berada di Jawa juga menerapkan strategi raya. Kekuasaan Majapahit pada abad XV mulai melemah dan entitas politik berbasis Islam bermunculan (Ricklefs, 2007). Demak, Pajang, dan Mataram Islam secara berurutan saling bergantian untuk memimpin Jawa. Kekuasaan dan pengaruh Kesultanan Mataram Islam berkembang pesat pada abad XVII. Mataram Islam menguasai bandar utama di kawasan pesisir utara Jawa (de Graaf & Pigeaud, 1985). Mataram pada tahun 1641, setelah Sultan Agung Hanyakrakusuma bertahta, mampu menguasai dan memonopoli perdagangan di wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah serta Madura dengan kekuatan militernya. Kekuatan Mataram Islam di Jawa diakui oleh Palembang, Banjarmasin, dan Jambi melalui beberapa perjanjian yang melibatkan VOC (Surya & Puji, 2024). Mataram Islam secara geopolitik bersaing dengan VOC untuk memonopoli perdagangan di Jawa. Sumber daya alam yang melimpah membuat kekuatan ekonomi dan militer Mataram Islam menjadi sangat kuat sehingga mampu memonopoli pasokan beras VOC dan menjadi basis kekuasaan Islam di Jawa pada abad XVII (Surya & Puji, 2024). Mataram Islam dikenal sebagai produsen beras yang dapat menjalin jaringan perdagangan dengan Malaka serta mampu bersekutu untuk menentang VOC.

Kesultanan Ternate dan Tidore dikenal sebagai kekuatan yang mampu menguasai beberapa wilayah dan peradaban di Kepulauan Maluku. Kedua kesultanan ini secara geopolitik bersaing dalam segi ekonomi, politik, dan militer untuk dapat menjadi kekuatan utama

di Kepulauan Maluku. Wilayah bagian selatan dikuasai oleh Tidore sedangkan wilayah bagian utara dikuasai oleh Ternate. Kedua Kesultanan ini memiliki komoditas rempah utama yaitu cengkeh. Komoditas ini banyak dicari oleh bangsa Eropa pada abad XV. Bangsa Eropa yang datang pertama kali yaitu Portugis kemudian beraliansi dengan Kesultanan Ternate, setelah itu bangsa Spanyol juga bersekutu dengan Kesultanan Tidore. Hubungan diplomasi dalam segi ekonomi, politik, dan militer dengan bangsa Eropa ini semakin memperkuat persaingan dan pertentangan antara Kesultanan Ternate dan Tidore selama abad XV hingga abad XVII di Kepulauan Maluku (Andaya, 1993). Strategi raya diterapkan oleh Kesultanan Ternate dan Tidore untuk bersaing satu sama lain agar dapat menjadi kekuatan utama di Kepulauan Maluku.

Sistem dan Birokrasi Politik Negara Tradisional di Nusa Tenggara

Negara tradisional menjadi entitas politik yang terbelakang ketika dihadapkan dengan modernisasi. Negara tradisional di Nusa Tenggara, di tengah intervensi asing, bertahan dengan mengkombinasikan tata kelola lokal dan asing. Kerajaan Larantuka memilih untuk memakai kredo Portugis dan Katolik untuk menata struktur politik dan pemerintahannya. Kerajaan Larantuka merasa puas dengan sistem tersebut untuk memperkuat identitas sekaligus membedakan dengan rival yaitu pedagang Islam dari Jawa dan sekutunya. Kajian tentang tata kelola negara tradisional yang mengakomodasi nilai-nilai negara modern tidak banyak dilakukan. Historiografi negara tradisional di Asia Tenggara biasanya hanya seputar perkembangan politik kerajaan seperti pendirian, kejayaan, dan keruntuhan saja (Glover & Bellwood, 2004; Hall, 2010; Miksic & Yian, 2016; O'Reilly, 2007). Beberapa sejarawan memilih untuk membahas birokrasi tradisional dari kerajaan tertentu (Bentley, 1986; Setianto, 2010). Kajian yang dilakukan oleh Bentley (1986) membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya negara tradisional di Asia Tenggara. Bentley menyebutkan Chinasasi, Indianisasi, kontrol air, struktur pertukaran yang bergantung pada tata kelola dunia, struktur sosial dan kontrol buruh, struktur politik, serta struktur simbolik. Kajian terdahulu ada juga yang membahas bentuk tradisional dari negara modern. Kajian yang dilakukan oleh Liubashits dkk. (2021) menyelidiki

negara-negara tradisional dalam konteks asal-usul sejarahnya. Karya ini membuktikan bahwa dalam tatanan hukum tradisional, kepemilikan tanah menghasilkan kekuasaan politik yang didistribusikan antara beberapa pemegang hak, yang mewakili masyarakat, dan negara itu sendiri.

Sistem politik negara tradisional, baik di Indonesia maupun Asia Tenggara, secara umum menganut sistem monarki. Sistem ini tidak berbeda jauh dengan kerajaan atau kedatuan karena ketiganya dipimpin oleh penguasa monarki. Sistem monarki merupakan sistem tertua yang kini banyak ditinggalkan. Data menunjukkan hanya tersisa empat negara modern yang menganut sistem monarki absolut, dan sekitar 30 negara monarki menganut pembatasan konstitusional untuk mengatur pemerintahannya. Kerajaan tradisional di Indonesia secara keseluruhan telah menyerahkan kedaulatan politik pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), meskipun hingga kini masih terdapat beberapa kerajaan yang masih berdiri. Kerajaan tradisional yang masih berdiri tidak memiliki kekuasaan secara politik namun masih diperkenankan untuk melestarikan kebudayaan kerajaan.

Sistem politik dan pemerintahan kerajaan di Lombok sebelum Indonesia merdeka berbentuk kesultanan. Sistem politik ini dipengaruhi oleh posisi penting pemimpin atau tokoh elit serta hubungan kekerabatan. Ketatanegaraan Lombok pada abad XVII-XVIII, sebelum masuknya pengaruh Kerajaan Bali, dipimpin oleh Sultan atau Raja Muslim sebagai penguasa tertinggi. Bentuk sistem politik pada periode ini disebut Kedatuan, oleh karena itu Raja atau penguasa lokal di kawasan ini memiliki gelar Datu. Kerajaan yang dipimpin oleh Datu ada empat yaitu Kerajaan Selaparang, Sakra, Pejanggi, dan Kuripan. Datu yang memiliki pengaruh dan kekuasaan paling kuat yaitu Datu Selaparang sebagai Raja dari Kerajaan Selaparang (Parimarta, 2016). Mayoritas penduduk Selaparang beragama Islam (Hagerdal, 2016; Parimarta, 2014). Datu Selaparang memimpin penduduk Kerajaan Selaparang yang disebut dengan orang Sasak.

Raja Selaparang memiliki kekuasaan absolut dan didukung oleh para pembesar dan pejabat yang bertanggung jawab atas berbagai aspek pemerintahan, termasuk pengelolaan sumber daya dan penegakan hukum. Sistem pemerintahan Selaparang dalam konteks ini juga dipengaruhi oleh tradisi lokal dan interaksi dengan kekuatan

asing, seperti Portugis dan Belanda, yang berusaha menguasai perdagangan di wilayah tersebut (Jamaluddin, 2021). Sistem pertahanan dan militer Kerajaan Selaparang berfokus pada perlindungan wilayah dari ancaman eksternal terutama serangan dari kerajaan tetangga dan penjajah. Kerajaan ini membangun aliansi strategis dengan kekuatan lokal dan asing untuk memperkuat posisi militernya. Hal ini menunjukkan bahwa militer Selaparang tidak hanya berfungsi sebagai alat pertahanan tetapi juga sebagai instrumen untuk mempertahankan kekuasaan Raja dan stabilitas politik di dalam negeri.

Diplomasi Kerajaan Selaparang sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan kekuatan kolonial Eropa terutama Portugis dan Belanda. Kerajaan ini berupaya untuk menjaga kedaulatan dan menghindari dominasi satu kekuatan asing dengan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Perdagangan menjadi alat diplomasi yang penting sehingga Selaparang menawarkan akses ke rempah-rempah dan hasil pertanian yang sangat dicari di pasar internasional. Hubungan perdagangan ini tidak hanya meningkatkan ekonomi kerajaan tetapi juga memperkuat posisinya di antara kerajaan-kerajaan lain di wilayah tersebut (Jamaluddin, 2021). Perkembangan politik Kerajaan Selaparang secara keseluruhan mencerminkan interaksi yang dinamis antara kekuasaan lokal dan pengaruh asing, serta strategi kerajaan dalam mengelola sumber daya sekaligus hubungan diplomatik untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran.

Dominasi Kerajaan Karangasem atas Lombok semakin menguat pada tahun 1740 karena proteksi Makassar yang semakin memudar. Kerajaan Karangasem hampir menduduki seluruh wilayah Lombok. Eksistensi Karangasem-Bali memudar ketika pemerintah kolonial Belanda menyerang Lombok pada tahun 1894 (Al-Jamali, 2021). Kerajaan Karangasem-Bali mendirikan dua kerajaan baru di Lombok. Kerajaan itu diberi nama Kerajaan Singasari (1740-1838) dan Mataram (1740-1894). Kerajaan Singasari bertindak sebagai ketua dalam suatu federasi dan kekuasaan ini lebih terlihat bersikap toleran terhadap heterogenitas masyarakat Lombok. Kerajaan Mataram memiliki pendekatan yang sentralistik dalam kekuasaannya. Sentralisme Mataram yang pagan membuat bangsawan

Sasak, yang telah memeluk Islam, memilih untuk memimpin perlawanan-perlawanan kecil pada Kerajaan Bali itu. Kerajaan Singasari dan Mataram menggunakan orang Sasak lainnya sebagai tameng untuk menghadapi serangan tersebut.

Kedaulatan kerajaan yang semakin memudar dapat terjadi karena kurang memperhatikan aspek regenerasi dan sirkulasi elit yang baik. Kondisi internal yang semakin melemah menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami geopolitik dan menghadapi pergolakan politik. Kedaulatan negara saling diperebutkan antar kerajaan, hingga abad XVII tidak ada kerajaan yang mampu menguasai sebagian besar wilayah nusantara. Persaingan dan pertentangan antar kerajaan yang ada mengakibatkan aktualisasi kedaulatan kerajaan di nusantara tidak berjalan maksimal. Pada periode yang sama, bangsa Barat mulai berupaya mengarungi dunia untuk mencari rempah-rempah dan komoditas penting lainnya. Bangsa Eropa berlomba untuk memperebutkan daerah yang strategis, sehingga sejak saat itu beberapa wilayah kerajaan di nusantara dianeksasi dan dijajah oleh bangsa asing (Al-Jamali, 2021). Monopoli asing dan kebijakan yang eksklusif semakin menyengsarakan penduduk lokal.

Kerajaan Larantuka menganut sistem monarki yang dapat ditelusuri kembali ketika membaca cerita rakyat Larantuka. Cerita rakyat yang menarik untuk dibahas yaitu kisah Raja Sira Demong Pagomolong. Analisis lebih jauh mengenai identitas Raja dan ekspansi ke Flores Timur dapat dilakukan apabila cerita rakyat tersebut dikaitkan dengan kisah Demung (Demong) dan Paji (Panji). Demon dan Paji adalah dua bersaudara yang berasal dari gunung atau *ile* sehingga kedua tokoh ini menganggap bahwa gunung adalah tanah kelahirannya (Arndt, 2002). Cerita lain menyebutkan bahwa Demon dan Paji adalah dua bersaudara yang merupakan keturunan pelancong Jawa dari Majapahit. Kedatangan orang Majapahit menuju Kepulauan Solor, Galiyao dalam Negarakertagama, menemukan seorang wanita suku asli Lamaholot di sebuah gunung yang kemudian memiliki keturunan Demon dan Paji (Barnes, 1982). Orang Jawa adalah salah satu nenek moyang bagi masyarakat Lamaholot, meskipun tidak ada bukti tulisan yang menyebutkan hal ini namun dapat dilihat dari kisah Majapahit yang memiliki cendana sebagai komoditas dagang

di Jawa pada abad XIII. Komoditas cendana yang dimiliki Majapahit diperoleh melalui perdagangan di wilayah timur (Widyatmaka, 2014), sehingga sangat wajar apabila muncul cerita bahwa orang Jawa pergi ke timur dan melakukan perkawinan dengan penduduk lokal. Hal ini dilakukan untuk kepentingan perdagangan dan perluasan kekuasaan.

Asal-usul Demon dan Paji, jika dikaitkan dengan mitos lokal, adalah seorang penghuni gunung bernama Watuele dan Lenurat yang melakukan perkawinan dengan pendatang (Vatter, 2015). Garis keturunan Watuele mengarah pada Raja pertama Larantuka sedangkan Lenurat kawin dengan seorang bernama Paji Golo Arakiang yang menjadi keturunan Paji. Demon dan Paji adalah seorang pangeran Jawa sebagai Raja Larantuka atau Galiyao yang sah di bawah hegemoni Majapahit (Abdurachman, 2008). Demung (Demon) sebagaimana diceritakan oleh Prapanca, memimpin rakyatnya untuk merebut Flores Timur pada abad XIV. Flores Timur dibawah Larantuka terbagi menjadi sepuluh desa yang disebut *Lewopulo*. Raja Sira Demong bertindak sebagai kepala pemerintahan dibantu oleh lima perwakilan suku setempat atau *Pou Suku Lema*. Para wakil tersebut adalah bangsawan tingkat kedua setelah Raja. *Pou Suku Lema* mengendalikan *Kabelen Lewo* atau kepala desa dan kepala suku (Yoseph, 2010). Model pemerintahan daerah ini memungkinkan Larantuka mempertahankan kemerdekaannya sekaligus menyebarkan pengaruh ke daerah sekitarnya (Steenbrink & Aritonang, 2008). Hal ini tentu berkontribusi pada kebangkitan Larantuka sebagai kerajaan terkemuka di wilayah tersebut.

Perkembangan Politik dan Strategi Raya Negara Tradisional di Lombok

Negara tradisional Lombok memiliki letak geografis yang cukup strategis. Para pedagang dan pelancong dapat mencapai Lombok setelah melewati pesisir utara Jawa. Lombok berada pada rute perdagangan rempah-rempah selatan. Jalur ini terbentuk karena adanya koneksi antar pelabuhan untuk kepentingan yang sama. Pada kurun niaga relasi yang kuat antar wilayah di nusantara telah membentuk suatu jembatan sosial. Hasil interaksi ini mampu menciptakan percampuran kebudayaan dalam berbagai aspek seperti budaya, ekonomi, politik, dan agama sehingga menjadikan Lombok begitu pluralistik.

Kebudayaan Lombok sangat dipengaruhi oleh tradisi Jawa, Bali, dan Makassar. Pengaruh Melayu di Lombok juga cukup signifikan, mengingat Lombok menghubungkan kepulauan rempah-rempah dengan laut Jawa (Jawa dan Sumatera). Globalisasi di Lombok mendorong perkembangan penduduk Sasak, tidak hanya memeluk Islam tetapi juga berkembang menjadi komunitas pedagang yang kuat (Al-Jamali, 2021; Hariyono, 2011). Kondisi geografis Lombok yang cukup strategis menempatkan wilayah ini menjadi ruang aktivitas regional dan global.

Labuan Lombok tidak hanya menjadi tempat transit bagi para saudagar yang melakukan transaksi jual beli namun juga menyediakan berbagai komoditas agraris. Hal ini membuat para pedagang dari luar melakukan transaksi dengan pedagang lokal sehingga berdampak pada perkembangan sarana transportasi dan tumbuhnya kota-kota pelabuhan yang dikunjungi oleh para pedagang dari berbagai tempat. Kondisi ini turut mempengaruhi aktivitas politik yang membuka sekaligus mengeratkan ruang komunikasi dan hubungan antar pulau. Hubungan yang dijalin oleh kerajaan-kerajaan di Lombok tidak hanya terbatas pada pulau yang berdekatan saja, akan tetapi beberapa kerajaan telah menjalin hubungan dagang dengan wilayah yang cukup jauh seperti Palembang dan Aceh. Hal ini terlihat dari Kerajaan Selaparang yang berpusat di pesisir timur pulau Lombok. Selaparang membuat pasar sebagai tempat bertemunya para pedagang di bandar yang dimiliki. Hal ini menunjukkan besarnya perhatian Kerajaan Selaparang-Lombok dalam mengatur aktivitas perdagangan (Al-Jamali, 2021). Selaparang berupaya untuk menjadi kerajaan agraris-maritim karena telah berhasil mengelola daerah pedalaman serta menghasilkan berbagai produk agraris.

Kerajaan Selaparang memanfaatkan komoditas beras sebagai sumber daya alam utama di kawasan Lombok untuk menjalin jaringan perdagangan dan politik dengan Kerajaan Gowa, Makassar pada abad ke-17 (Hagerdal, 2016; Suwitha, 2024). Kerajaan Gowa pada periode ini mengalami masa kejayaan terutama setelah perkembangan Islam dan jaringan perdagangan yang pesat. Hal ini yang menyebabkan Kerajaan Gowa-Makassar mampu memperluas pengaruhnya hingga ke kawasan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pengaruh ini disebabkan adanya diplomasi ekonomi, politik,

dan militer antar pemimpin atau Raja. Diplomasi melalui strategi militer antara kedua kerajaan ini dibuktikan ketika Kerajaan Gowa mengirimkan armada militernya di kawasan Lombok untuk membantu kepentingan dan hubungan ekonomi-politik dengan kerajaan setempat, salah satunya Selaparang (Parimartha, 2016). Oleh karena itu, Raja Gowa dan pedagang Makassar memiliki hubungan baik dengan Sultan atau Datu di Lombok.

Kerajaan Selaparang mendominasi persaingan dengan kerajaan-kerajaan lokal di Lombok dan berupaya untuk memperluas pengaruh serta wilayah kekuasaannya melalui kekuatan militer (Hagerdal, 2016). Kekuatan militer juga berpengaruh pada konflik internal Kerajaan Selaparang, salah satunya pertikaian antara Datu Selaparang dengan Patih Banjar Getas yang menimbulkan konflik militer (Parimartha, 2016). Kekuatan militer memiliki peran yang sangat penting ketika Kerajaan Selaparang mengalami kemunduran terutama saat terjadi peristiwa penaklukan oleh Kerajaan Karangasem-Bali melalui strategi militer di akhir abad ke-17 (Ricklefs, 2007). Wilayah Kerajaan Selaparang di Lombok pada tahun 1692 dikuasai oleh Kerajaan Karangasem-Sasak atau Kerajaan Singasari-Bali (Hagerdal, 2016; Suwitha, 2024). Peralihan kekuasaan di kawasan Lombok ini terjadi setelah peristiwa penaklukan Raja-Raja Lombok oleh Kerajaan Karangasem-Bali yang dipimpin oleh Dane Poleng melalui strategi dan kekuatan militer. Dukungan dari kekuatan militer dan ekonomi menjadikan Kerajaan Karangasem-Sasak semakin kuat untuk menyebarluaskan pengaruh dan kekuasaannya di kawasan Lombok (Parimartha, 2016). Peristiwa penaklukan Kerajaan Selaparang menjadi bukti bahwa kekuatan militer dan ekonomi merupakan faktor fundamental bagi keberlangsungan suatu negara dan kemunculan kekuasaan baru di suatu wilayah.

Kekuasaan Kerajaan Karangasem-Sasak di kawasan Lombok pada periode akhir abad ke-17 mengakibatkan kemunculan sistem politik yang dikontrol oleh Raja dan bangsawan Bali. Peralihan kekuasaan ini menandakan adanya dominasi para elit Hindu terhadap penduduk Lombok yang mayoritas Muslim melalui penaklukan militer (Hagerdal, 2016; Parimartha, 2016). Penaklukan Kerajaan Selaparang oleh Kerajaan Karangasem-Bali salah satunya disebabkan adanya pertikaian antara Datu atau

pemimpin lokal di Lombok yang berdampak pada melemahnya kekuatan politik dan militer (Parimartha, 2014). Kekuatan militer juga digunakan oleh pemimpin lokal atau Datu untuk melakukan pemberontakan terhadap Kerajaan Karangasem-Sasak salah satunya yaitu Datu Mareje-Selaparang. Pemberontakan dari Datu Mareje dapat diatasi melalui strategi militer dan kapasitas kontrol kepemimpinan yang baik dari Kerajaan Karangasem-Sasak dengan cara meminta bantuan kekuatan militer kepada Kerajaan Karangasem-Bali pada tahun 1723-1725. Strategi militer ini juga mampu membantu Kerajaan Karangasem-Sasak saat menghadapi konflik dengan Sumbawa yang berlangsung hingga tahun 1748 (Hagerdal, 2017). Penaklukan atas Sumbawa mampu memberikan peluang terhadap Kerajaan Karangasem-Sasak untuk memperluas pengaruhnya di kawasan Lombok.

Kerajaan Karangasem-Bali dipimpin oleh Raja yang bergelar I Gusti Made Karangasem I, II, dan III selama periode tahun 1740-1838 (Najmuddin & Nazri, 2020). Catatan dalam Babad Pamau-Cangah Karangasem menunjukkan bahwa pemimpin pertama Kerajaan Karangasem-Bali yaitu I Gusti Ngurah Made Karangasem I (Hagerdal, 2017). Kerajaan vasal Karangasem di Lombok pada tahun 1741 dipimpin oleh Raja yang bernama Gusti Wayan Taga. Tokoh ini dijuluki sebagai Raja Selaparang karena pengaruh dan kekuatannya sebagai pemimpin (Parimartha, 2016). Kerajaan Karangasem-Bali di bawah kepemimpinan I Gusti Ngurah Made Karangasem mampu menguasai wilayah dari kerajaan-kerajaan lain di kawasan Bali sekaligus memindahkan pusat pemerintahan di Lombok pada tahun 1805 (Hagerdal, 2016). Raja Karangasem-Bali yaitu I Gusti Ngurah Made Karangasem I wafat pada tahun 1806 dan digantikan oleh putranya yang bernama I Gusti Gde Ngurah Lanang Karangasem. Kerajaan ini memiliki tujuan politik untuk memperluas kekuasaannya di kawasan Bali dan Lombok ketika dipimpin oleh Ngurah Lanang Karangasem. Hal ini memicu konflik dengan Kerajaan Buleleng pada tahun 1823. Konflik ini menyebabkan Ngurah Lanang Karangasem melarikan diri ke wilayah kerajaan vasal yaitu Karangasem-Sasak di Lombok (Parimartha, 2014), karena Raja Buleleng I Gusti Pahang, menyerang istana atau puri Kerajaan Karangasem-Bali dengan kekuatan militernya.

Kekuatan militer berpengaruh terhadap misi perluasan kekuasaan dari Kerajaan Mataram-Bali di kawasan Lombok pada tahun 1830. Kerajaan Mataram-Bali pada periode ini menjadi kerajaan terbesar kedua di Lombok setelah Kerajaan Karangasem-Sasak yang dipimpin oleh Cokorda. Pada tahun 1838 terjadi pertempuran antara Kerajaan Karangasem-Sasak dengan Kerajaan Mataram-Bali. Kekuatan militer dari pasukan Karangasem-Sasak pada awalnya lebih unggul karena memperoleh bantuan dari pedagang Denmark yaitu Mads Lange (Parimarta, 2014; Najmuddin & Nazri, 2020). Pasukan Mataram-Bali pada akhirnya mampu mengungguli kekuatan militer dari pasukan Karangasem-Sasak karena mempunyai strategi militer yang baik dan hubungan diplomasi dengan pemimpin Bugis serta pedagang Inggris yaitu G.P. King. Pertempuran ini dimenangkan oleh Kerajaan Mataram-Bali setelah penguasa Karangasem-Sasak yaitu Cokorda wafat pada tahun 1838. Hal ini menandakan jatuhnya kekuasaan Kerajaan Karangasem-Sasak di Lombok.

Perkembangan Politik dan Strategi Raya Kerajaan Larantuka

Negara tradisional di kawasan Nusa Tenggara Timur dikenal sebagai wilayah penghasil komoditas kayu cendana sejak abad VII (Jebarus, 2017), salah satu diantaranya yaitu Kerajaan Larantuka. Kerajaan Larantuka pada abad XIII mampu menjalin hubungan dengan Kerajaan Majapahit dalam hal ekonomi-politik. Kerajaan ini menjadi wilayah kekuasaan dari Majapahit (Cribb & Kahin, 2004). Wilayah Kerajaan Larantuka secara geografis merupakan bagian dari Laut Sawu yang terdiri atas beberapa pulau-pulau besar di Nusa Tenggara Timur (Pradjoko, 2017). Sejarah terbentuknya Kerajaan Larantuka berkaitan dengan cerita rakyat tentang Paji dan Demon. Cerita Paji dan Demon adalah mitologi yang berkembang di kawasan Flores Timur. Cerita ini mengisahkan adanya pertentangan dan persaingan antara dua penguasa lokal yaitu Paji dari Kerajaan Larantuka dan Demon dari Kerajaan Adonara.

Cerita Paji dan Demon merepresentasikan awal mula terbentuknya Kerajaan Larantuka sekaligus melatarbelakangi terjadinya konflik internal yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan militer dengan Kerajaan Adonara di kawasan Flores Timur (Barnes, 1987). Cerita rakyat ini

juga berkaitan dengan persaingan antara pengaruh agama Islam dan Katolik di Flores Timur serta jaringan perdagangan pada akhir abad XVI (Hagerdal, 2012). Perselisihan kelompok Paji dan Demon terjadi pada akhir abad XVI yaitu ketika Suku Lamaholot terpecah menjadi dua kelompok. Perpecahan ini diyakini sebagai konflik antar dua bersaudara yang melibatkan Kerajaan Larantuka dan Kerajaan Adonara. Kerajaan Larantuka adalah orang Demon yaitu komunitas yang hidup di dataran tinggi atau pegunungan, sedangkan Kerajaan Adonara adalah orang Paji yaitu komunitas yang hidup di kawasan pesisir.

Bangsa Eropa pada periode modern awal memiliki pengaruh terhadap kekuasaan lokal di wilayah jajahannya, khususnya di kawasan Flores Timur. Pengaruh ini mencakup segala aspek di wilayah jajahan yang berkaitan dengan strategi raya. Kekuatan Bangsa Eropa mampu memberikan pengaruh bahkan intervensi terhadap kekuasaan pemerintah tradisional mulai dari aspek ekonomi, politik, budaya, agama, dan militer. Bangsa Eropa sangat sulit untuk diusir karena bangsa Barat mampu memberikan perlindungan militer, jaringan ekonomi, serta kedudukan politik terhadap Raja maupun penguasa lokal di wilayah jajahan. Oleh karena itu, para Raja dan penguasa lokal di kawasan Asia Tenggara dapat menerima pengaruh dan intervensi dari bangsa Eropa meskipun sifatnya menindas dan mengeksploitasi (Hagerdal, 2012). Raja dan penguasa lokal memanfaatkan bangsa Eropa untuk kepentingan wilayah khususnya dalam hal persaingan geopolitik dengan pihak lawan.

Kerajaan di kawasan Flores Timur seperti Kerajaan Larantuka dan Adonara telah menjalin hubungan diplomasi dengan bangsa Eropa pada akhir abad ke-16 melalui jaringan perdagangan dan politik. Kedatangan awal Portugis di Nusa Tenggara Timur melalui para pedagang dan para pastor Dominikan yang tiba di Solor. VOC sebagai pihak pesaing melakukan intervensi dengan cara menyerang benteng Portugis di Lohayong pada tahun 1613. Portugis setelah penyerangan tersebut mundur ke wilayah Larantuka dan menjalin diplomasi dengan Raja Larantuka. Pihak Portugis menyebarkan pengaruh agama Katolik di Larantuka dan bersekutu dengan para Raja lokal (Barnes, 2005; Barnes, 2009). Pihak VOC menandatangani perjanjian politik dengan para pemimpin Muslim atau *Sengaji* dari aliansi

lima desa yang disebut dengan *wetan lema* yang meliputi Adonara, Terong dan Lamahala di Adonara, serta Lohayong dan Lamakera di Solor. VOC menganggap pemimpin Muslim atau *Sengaji* sebagai sekutu yang penting untuk mencapai tujuan politik-ekonomi.

Pengaruh Portugis terhadap Kerajaan Larantuka selain melalui diplomasi politik-ekonomi juga melalui pengaruh agama. Portugis melalui para misionaris Katolik menyebarkan pengaruh agama Katolik terhadap Raja dan penduduk Larantuka. Raja Larantuka Ola Ado Bala menerima dan mengikuti agama Katolik yang dibawa oleh para misionaris Portugis. Raja Ola Ado Bala pada akhirnya memutuskan untuk menganut agama Katolik sehingga rakyat Larantuka mengikuti untuk meyakini agama baru tersebut. Hal ini menandakan terjadinya peralihan kepercayaan lokal Lamaholot yaitu *Rerawulan Tana-ekan* menjadi Katolik (Kebing & Martasudjita, 2022). Dominasi unsur keagamaan Katolik di Larantuka dimanfaatkan Portugis untuk menyebarkan pengaruh serta diplomasi untuk kepentingan dan tujuan negara dengan Kerajaan Larantuka melalui para pendeta dan misionaris Katolik. Portugis menjadikan Larantuka sebagai wilayah koloninya setelah benteng Portugis di Solor dikuasai oleh VOC pada tahun 1613. Portugis memanfaatkan para pendeta Katolik untuk memperkuat pengaruh dan kepentingannya yang berkaitan dengan proyek *Estado da India*. Pendeta Katolik menjadi pemimpin desa yang dihormati oleh penduduk di beberapa desa Katolik Larantuka. Portugis melalui para pendeta Katolik memberikan senjata kepada penduduk Larantuka yang berupa busur, perisai, pedang, dan beberapa senapan api (Hagerdal, 2012). Pendeta Katolik mampu mempengaruhi dan memperoleh empati penduduk lokal agar mendukung kepentingan Portugis untuk melawan kekuasaan VOC di Flores Timur.

Hubungan diplomasi antara Kerajaan Larantuka dengan Portugis juga dilakukan melalui pernikahan campuran antara orang Portugis kulit putih dengan penduduk lokal. Pernikahan ini bertujuan untuk mempertahankan dominasi ekonomi-politik, budaya, dan bahasa Portugis serta identitas Katolik yang kuat di wilayah koloni. Pernikahan campuran antara bangsa Portugis dengan penduduk Larantuka mulai terjadi pada tahun 1613 setelah penyerangan

Benteng Henricus di Solor oleh VOC. Daerah Larantuka dikenal sebagai daerah pelarian dari orang-orang Eropa khususnya Portugis yang menentang pihak VOC pada masa itu. Perkawinan campuran ini memunculkan komunitas yang dinamakan *Larantuqueiros* atau Topas (Andaya, 2010; Hagerdal, 2012). Komunitas Portugis hitam yang biasa disebut dengan Topas mampu menguasai wilayah Larantuka, Flores Timur (Hagerdal, 2012). Orang Topas memiliki dua basis kekuasaan antara lain di Lifau, Pantai Utara Timor yang dipimpin oleh Mateus da Costa dan di Larantuka, Flores Timur dipimpin oleh Antonio Hornay. Kedua kelompok pasukan Topas pada tahun 1656 bertempur melawan pasukan VOC yang dipimpin oleh Arnoldus de Vlamingh van Oudtshoorn (Andaya, 2010). Kedua kelompok ini memiliki tujuan yang sama untuk melawan kekuasaan VOC di kawasan Flores meskipun pada kenyataannya saling bersaing satu sama lain.

Pemimpin kelompok Topas yaitu Mateus da Costa (1653-72) dan Antonio Hornay (1673-93) memiliki hubungan yang berbeda dengan orang Portugis kulit putih. Orang Portugis kulit putih Dominikan bersedia bersekutu dengan da Costa beserta orang Topas di Lifau namun menolak hubungan dengan orang Topas di Larantuka yang dipimpin oleh Hornay, terlebih ketika Hornay memimpin pertempuran dengan pasukan Ade di Pantai Timur Laut, Timor. Pasukan Hornay beraliansi dengan orang Konga, Sikka, dan Ugi di bagian timur pulau Flores. Orang Portugis kulit putih tetap menolak untuk bersekutu meskipun Hornay telah diangkat menjadi Kapten Mayor untuk menggantikan da Costa (Andaya, 2010). Status sosial Hornay yang semakin meningkat menjadi kekuatan untuk memperluas pengaruh politiknya di kawasan Flores Timur (Abdurachman, 2008). Hornay menikahi putri dari Raja Ambeno di Timor. Tujuan dari pernikahan ini yaitu untuk memperluas wilayah kekuasaan Antonio Hornay di Flores Timur (Heuken, 2002; Pradjoko & Kartika, 2014). Antonio Hornay menggunakan jalur pernikahan dengan putri dari Raja lokal dengan memanfaatkan hubungan diplomasi politik dan pengaruhnya di kawasan Flores Timur.

Antonio Hornay ketika menjabat sebagai Kapten Mayor di Larantuka telah menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin lokal yang berani menentang kekuasaan Portugis. Keberanian ini mampu menarik simpati dari orang-orang Topas di Flores Timur dan Tengah (Andaya, 2010).

Antonio Hornay pada tahun 1655 diangkat menjadi *capitao-mor de timor*. Kedudukan ini sekaligus menjadikan para penerusnya sebagai Raja Timor yang tidak dinobatkan (Abdurachman, 2008). Antonio Hornay pada tahun 1677 menolak perwakilan resmi dari kekaisaran Portugis dan Raja muda Goa yaitu Joao Antunes yang dikirim di wilayah Lifau untuk menjadi Kapten Mayor. Joao Antunes tidak jadi menduduki jabatannya di Lifau dan kembali ke Goa, India karena adanya penolakan dari Hornay (Andaya, 2010; Heuken, 2002). Antonio Hornay dianggap sebagai pemimpin yang mahir dalam memanfaatkan hubungan internasional untuk memperkuat kedudukan dan kekuasaannya, serta mampu mengalahkan kekuasaan Portugis di wilayah Lifau (Andaya, 2010). Antonio Hornay menunjukkan kapasitasnya sebagai Raja Larantuka ketika mampu menjalin hubungan dengan para penguasa lokal bahkan menjalin hubungan dengan VOC melalui jaringan perdagangan pohon cendana untuk dikirimkan kepada pihak Belanda di Kupang.

Antonio Hornay dengan menggunakan reputasinya sebagai Raja Larantuka mampu memonopoli perdagangan kayu cendana yang menguntungkan secara ekonomi (Abdurachman, 2008). Hornay mampu menjalin hubungan dengan penguasa Buton untuk membantu menguasai wilayah Solor. Hornay meminta bantuan armada kapal militer kepada para penguasa Bugis dari wilayah Bone, Sulawesi Selatan untuk melindungi kawasan pesisir di Flores dari serangan penguasa Bima dari Pulau Sumbawa. Pengaruh dan kekuasaan dari Antonio Hornay sebagai Raja Larantuka menjadikan kekuasaan Kerajaan Larantuka semakin meluas yang meliputi wilayah Flores bagian tengah dan timur, sebagian besar wilayah Timor bagian timur dan barat, serta sebagian pulau Adonara, Solor, dan Lembata. Hal ini berdampak pada orang-orang Topas yang dianggap sebagai kekuatan militer sehingga dipertimbangkan pada periode akhir abad ke-17 dan awal abad-18 (Andaya, 2010). Antonio Hornay wafat pada tahun 1693, sekaligus menjadi penanda kemunduran kekuasaan orang Topas dan keluarga d'Hornay di Flores. Antonio de Mesquita Pimentel akhirnya merebut kekuasaan untuk sementara waktu pada tahun 1696 yang melemahkan kekuatan politik dari keluarga d'Hornay. Kekuasaan keluarga da Costa mulai bangkit kembali dengan bantuan dari

orang-orang Dominikan setelah Antonio Hornay wafat. Keluarga da Costa mampu menjadikan wilayah Lifau sebagai pusat politik, militer, dan agama Katolik yang melampaui wilayah Larantuka (Abdurachman, 2008). Kekuasaan keluarga da Costa pada tahun 1700 mencakup seluruh wilayah Flores kecuali Kupang yang dikuasai oleh VOC.

Kekuasaan kelompok Topas dari keluarga Hornay maupun keluarga da Costa mulai melemah pada tahun 1749 yaitu ketika mengalami kekalahan pada pertempuran melawan VOC di wilayah Timor barat. Pertempuran ini berdampak pada jaringan dan hubungan perdagangan dengan para pedagang asing. Pedagang dari Makau takut untuk melakukan kegiatan perdagangan di kawasan Timor setelah berakhirnya pertempuran tersebut. Hal ini menyebabkan kerugian ekonomi dan semakin lemahnya sistem jaringan perdagangan di kawasan ini yang sebelumnya didominasi oleh orang-orang Topas. Oleh karena itu, selama periode pertengahan hingga akhir abad ke-18 pengaruh dan kekuasaan orang-orang Topas di wilayah Flores semakin terbatas (Hagerdal, 2007). Berdasarkan konteks dinamika kekuasaan di kawasan Flores khususnya Larantuka pada periode pra-kolonial hingga masa modern awal ini berkaitan dengan konsep strategi raya. Pada periode tersebut dapat dikatakan bahwa diplomasi dan kekuatan militer mampu mempengaruhi sistem ketatanegaraan, tujuan, dan keberlangsungan kekuasaan dari suatu negara. Oleh karena itu, membangun aliansi dengan elit dan penguasa lokal dapat memberikan keuntungan bagi pihak Portugis maupun VOC, khususnya dalam hal kekuasaan, politik, dan ekonomi yang berhubungan dengan komoditas pohon cendana di kawasan Pesisir Timor.

Penguasa dan elit lokal di kawasan Pesisir Timor juga memperoleh keuntungan ekonomi, perlindungan militer, serta kedudukan politik dari adanya hubungan dengan pihak Portugis dan VOC di masa itu (Hagerdal, 2012). Hal ini dipengaruhi oleh peran dan kedudukan Raja di Larantuka yang sangat kuat sehingga mampu menjalin hubungan diplomasi, membangun jaringan perdagangan, menggalang kekuatan militer, serta menyatakan perang dengan pesaing lokal maupun asing (Barnes, 2008a). Puncak aliansi antara Kerajaan Larantuka dan Portugis terjadi pada masa pemerintahan Raja Dom Lorenzo Diaz Vieira Godinho I pada tahun

1831. Raja Dom Lorenzo Diaz Vieira Godinho memiliki gelar sebagai Kolonel Portugis. Raja Dom Lorenzo Diaz Vieira Godinho pada masa pemerintahannya mewajibkan rakyat untuk berbicara menggunakan bahasa Portugis dan Lamaholot (Barnes, 2008b). Kerajaan Larantuka pada masa pemerintahan Raja Dom Lorenzo Diaz Viera Godinho II tahun 1887-1904 mengalami kemunduran yang disebabkan oleh kurangnya kapasitas pemimpin atau Raja (Barnes, 2008a). Kemunduran Kerajaan Larantuka juga disebabkan oleh konflik internal maupun eksternal serta ketidakstabilan sistem politik pemerintahan.

SIMPULAN

Perkembangan politik dan strategi raya negara tradisional di Lombok dapat dianalisis berdasarkan perspektif sejarah, dinamika lokal, hubungan antar kerajaan, serta hubungan dengan kekuatan asing seperti kolonialisme Eropa. Strategi ini terbentuk melalui perpaduan kekuatan militer, aliansi politik, serta penguasaan ekonomi terutama dalam hal perdagangan agraris dan maritim. Perkembangan politik dan strategi raya Kerajaan Larantuka mengarah pada diplomasi religius dan hubungan dagang dengan negara lain termasuk Portugis untuk mempertahankan otonomi dan struktur sosial politiknya. Strategi raya negara tradisional di Nusa Tenggara secara keseluruhan menunjukkan fleksibilitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan internal maupun eksternal. Negara tradisional mampu menciptakan model kepemimpinan fleksibel yang bergantung pada pengelolaan sumber daya lokal, aliansi politik, dan diplomasi dengan kekuatan luar. Hal ini sangat relevan dengan pengelolaan otonomi lokal masa kini khususnya dalam konteks globalisasi dan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat memperkuat struktur pemerintahan lokal, membuat kebijakan berbasis budaya, sekaligus menjalin hubungan dengan pemerintah pusat dan aktor global melalui nilai-nilai kearifan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulah, T., Azra, A., & Burhanudin, J. (2011). *Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 3: Kedatangan dan Peradaban Islam*. Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve.
- Abdurachman, P. R. (2008). *Bunga Angin Portugis di Nusantara: Jejak-Jejak Kebudayaan Portugis di Nusantara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Adam, A. F. (2021). Strategi Marketing Politik Adiatma Dwi Putra - Sulkarnain pada Pemilihan Walikota Kendari Tahun 2017. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 14(1), 70-93. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v14i1.1483>
- Afhiani, S. N., Elyta, E., & Apriyani, E. (2024). Strategi Pendidikan Politik Pemilih Pemula (Generasi Z) Menjelang Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Kubu Raya. *Sosio Edukasi: Jurnal Studi Masyarakat dan Pendidikan*, 7(2), 75-89. <https://doi.org/10.29408/sosedu.v7i2.24031>
- Agustino, L., Sylviana, M., & Silas, J. (2023). Institusionalisasi dan Ketahanan Partai dalam Demokrasi Elektoral Indonesia: Studi Kasus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. *Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Science*, 4(1), 105-130. <https://doi.org/10.57266/epistemik.v4i1.129>
- Alayya, J. (2023). Strategi Populisme “Wong Cilik” Ganjar Pranowo dalam Twitter untuk Mengelola Citra Positif. *Jurnal Komunikasi Profesional*, 7(3), 354-368. <https://doi.org/10.25139/jkp.v7i3.5783>
- Al-Jamali, M. Q. (2021). *Membaca Peran Lombok dalam Perdagangan Nusantara dan Dunia*. Artikel Belum Dipublikasikan.
- Andaya. (1993). *The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Andaya, L. Y. (2010). The “Informal Portuguese Empire” and the Topasses in the Solor Archipelago and Timor in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. *Journal of Southeast Asian Studies*, 41(3), 391-420. <https://doi.org/10.1017/S002246341000024X>
- Arndt, P. (2002). *Demon dan Paji Dua Bersaudara yang Bermusuhan di Kepulauan Solor*. Maumere: Penerbit Puslit Candraditya.
- Bajri, H. K., & Akim, A. (2021). Faktor Domestik yang Memengaruhi Kebijakan Luar Negeri Iran terhadap Arab Saudi Pascaeksekusi Mati Nimr Al-Nimr. *Jurnal ICMES: The Journal of Middle East Studies*, 5(1), 108-124. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v5i1.92>
- Barnes, R. H. (1982). The Majapahit Dependency Galiyao. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 138(4), 407-412.

- Barnes, R. H. (1987). Weaving and Non-Weaving Among the Lamaholot. *Indonesia Circle*, 15(42), 17-31.
- Barnes, R. H. (2005). Hongi Hinga and Its Implications: A War of Colonial Consolidation in the Timor Residence in 1904. *Bijdragen Tot de Taal, Land-En Volkenkunde*, 161(1), 1-39. <https://doi.org/10.1163/22134379-90003713>
- Barnes, R. H. (2008a). *Raja Lorenzo II: A Catholic kingdom in the Dutch East Indies*. Leiden: IAS Newsletter.
- Barnes, R. H. (2008b). The Power of Strangers in Flores and Timor. *Anthropos*, 103(2), 343- 353.
- Barnes, R. H. (2009). A Temple, a Mission, and a War: Jesuit Missionaries and Local Culture in East Flores in the Nineteenth Century. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 165(1), 32-61.
- Bentley, G. C. (1986). Indigenous States of Southeast Asia. *Annual Review of Anthropology*, 15(1), 275-305. <https://doi.org/10.1146/annurev.an.15.100186.001423>
- Boxer, C. R. (1968). *Fidalgos in the Far East 1550-1770*. Oxford: Oxford University Press.
- Cribb, R. B., & Kahin, A. (2004). *Historical Dictionary of Indonesia*. Lanham: Scarecrow Press.
- de Graaf, H. J., & Pigeaud, T. G. T. (1985). *Kerajaan-Kerajaan Islam di Jawa: Peralihan dari Majapahit ke Mataram*. Jakarta: Grafitipers.
- Delanova, M. O., & Yani, Y. M. (2021). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dan Malaysia Menghadapi Pandemi Covid-19. *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(2), 236-257. <https://doi.org/10.47313/pjsh.v6i2.1462>
- Dewi, N. K. S., Arini, D. G. D., & Suryani, L. P. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 37-41. <https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.37-41>
- Faisal, F., Mukhlis, M., Basri, H., Muksalmina, M., Abidin, Z., Iskandar, H., & Listriani, S. (2023). Konsultasi Publik Rancangan Qanun Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Bersama Pemerintah dan Masyarakat di Lhokseumawe. *Monsu'ani Tano: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 133-143. <https://doi.org/10.32529/tano.v6i1.2353>
- Fernandes, R., Ananda, A., Montessori, M., Putra, E. V., & Tiara, M. (2023). Efektivitas Pendidikan Pemilih Intrakurikuler dalam Mata Pelajaran Sosiologi untuk Membentuk Ketahanan Demokrasi: Studi pada Siswa SMAN 7 Sekolah Penggerak, Kota Padang, Sumatra Barat. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 18-36. <https://doi.org/10.22146/jkn.82319>
- Firmansyah, J. (2020). Strategi Pemasaran Politik Asaat Abdullah dalam Pemilu Legislatif Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019. *Jurnal Trias Politika*, 4(2), 136-154. <https://doi.org/10.33373/jtp.v4i2.2688>
- Glover, I., & Bellwood, P. S. (2004). *Southeast Asia: From Prehistory to History*. London: Psychology Press.
- Hagerdal, H. (2007). *Colonial or Indigenous Rule? The Black Portuguese of Timor in the 17th and 18th Centuries*. Leiden: IAS Newsletter.
- Hagerdal, H. (2012). *Lords of the Land, Lords of the Sea: Conflict and Adaptation in Early Colonial Timor, 1600-1800*. Leiden: Brill.
- Hagerdal, H. (2016). Expansion in the Shadow of the Company. *Bijdragen Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*, 172(2-3), 279-306. <https://doi.org/10.1163/22134379-17201021>
- Hagerdal, H. (2017). *Held's History of Sumbawa: An Annotated Translation*. Leiden: Amsterdam University Press.
- Hakiem, F., & Susilowati, I. (2020). Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Daerah dalam Mendukung Penguatan Keamanan Manusia: Studi Kasus Kerjasama Luar Negeri Pemprov D. I. Yogyakarta. *Dauliyah: Journal of Islam and International Affairs*, 5(1), 49-81. <https://doi.org/10.21111/dauliyah.v5i1.4274>
- Hall, K. R. (1985). *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.
- Hall, K. R. (2010). *A History of Early Southeast Asia: Maritime Trade and Societal Development, 100-1500*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers.
- Hariyono. (2011). Kedaulatan Indonesia dalam Perjalanan Sejarah Politik. *Diskursus Ilmu Sosial Budaya Indonesia*, 251(1), 1-10.
- Hayati, N. N., Murod, M., Budiana, H. R., & Setianti, Y. (2022). Strategi Mendesain dan

- Membangun Identitas Branding Politik Partai Persatuan Indonesia (Perindo) pada Pemilu Serentak 2019. *Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik dan Komunikasi Bisnis*, 6(1), 13-24. <https://doi.org/10.24853/pk.6.1.13-24>
- Heuken, A. (2002). *Be My Witness to the Ends of the Earth! The Catholic Church in Indonesia Before the 19th Century*. Jakarta: Cipta Loka Caraka.
- Hutabarat, G. F. I. (2022). Arah Kebijakan Luar Negeri Indonesia Pasca Perang Rusia-Ukraina Berdasarkan Perspektif National Interest. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 3(3), 154-163. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v3i3.1323>
- Iskandar, R., Ambarwati, A., & Putra, M. I. T. (2022). Analisis Strategi Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Belt and Road Initiative. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 7(1), 84-105. <https://doi.org/10.36859/jdg.v7i01.961>
- Jamaluddin, J. (2021). Kerajaan Selaparang sebagai Pusat Pemerintahan dan Pusat Perdagangan pada Abad XVI Berdasarkan Data-Data Arkeologis dan Manuskrip Sasak. *Manuskripta*, 11(2), 171-194.
- Jebarus, E. (2017). *Sejarah Keuskupan Larantuka*. Maumere: Ledalero.
- Kebingin, B. Y., & Martasudjita, E. (2022). A Local Wisdom in East Flores and the Shift: The Transition of the Lamaholot Religion to the Catholic Religion. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 9(2), 146-158. <https://doi.org/10.14738/assrj.92.11747>
- Liubashits, V. Y., Razuvaev, N. V., Mamychev, A. Y., Trofymenko, V. A., & Danilyan, V. O. (2021). Forms of Traditional States and Their Historical Specificity. *Humanidades & Inovacao*, 8(31), 112-122.
- Lobato, M. (1999). *Política e Comercio Dos Portugueses na Insulíndia: Malaca e as Molucas de 1575 a 1605*. Macau: Instituto Portugues do Oriente.
- Lombard, D. (1986). *Kerajaan Aceh: Jaman Sultan Iskandar Muda, 1607-1636*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Luttwak, E. (1979). *The Grand Strategy of the Roman Empire: From the First Century A. D. to the Third*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Luttwak, E. (2009). *The Grand Strategy of the Byzantine Empire*. Cambridge: Harvard University Press.
- Majid, N. (2023). Strategi Komunikasi Politik dalam Pemilihan Umum di Era Digital. *Perseptif: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 53-61. <https://doi.org/10.62238/perseptifjurnalilmusosialdanhumaniora.v1i2.34>
- Manggala, P. U. (2013). The Mandala Culture of Anarchy: The Pre-Colonial Southeast Asian International Society. *Journal of ASEAN Studies*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/10.21512/jas.v1i1.764>
- Matos, A. T. (1995). *Portugal on the Seaway to Spices: From Malacca to Australia*. Lisbon: Imprensa Nacional Casa da Moeda.
- Meganingratna, A., & Nur, A. (2022). Implementasi Aplikasi Safe Travel terhadap Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di Luar Negeri. *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 87-106. <https://doi.org/10.52423/neores.v3i2.24746>
- Miksic, J. N., & Yian, G. G. (2016). *Ancient Southeast Asia*. London: Routledge.
- Munandar, A. A. (2020). Majapahit and the Contemporary Kingdoms: Interactions and Views. *Berkala Arkeologi*, 40(1), 1-22. <https://doi.org/10.30883/jba.v40i1.522>
- Najmuddin, H. A., & Nazri, M. A. B. (2020). Kondisi Ekonomi, Politik dan Sosial Rakyat Sasak di Bawah Kekuasaan Kerajaan Bali. *Fikiran Masyarakat*, 7(1), 23-29.
- Nasution, F. A., Sembiring, D. N., Simatupang, I. A., Lintang, A. I., & Ardian, M. (2023). Strategi Komunikasi Politik Kepala Desa di Desa Suka Makmur Kabupaten Deli Serdang Tahun 2022-2028. *Komunika*, 19(2), 36-41. <https://doi.org/10.32734/komunika.v19i02.10246>
- Octavianti, R. D., & Budyanra, B. (2023). Determinan Utang Luar Negeri Indonesia Tahun 1981-2020. *Inferensi*, 6(1), 57-64. <https://doi.org/10.12962/j27213862.v6i1.14336>
- Onea, T. A. (2020). *The Grand Strategies of Great Powers*. London: Routledge.
- O'Reilly, D. J. W. (2007). *Early Civilizations of Southeast Asia*. Lanham: Rowman Altamira.
- Parimarta, I. G. (2014). *Lombok Abad XIX: Politik, Perdagangan, dan Konflik di Lombok, 1831-1891*. Denpasar: Pustaka

- Larasan.
- Parimartha, I. G. (2016). *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara, 1815-1915*. Yogyakarta: Ombak.
- Poesponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3: Zaman Pertumbuhan & Perkembangan Kerajaan Islam di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pradjoko, D. (2017). From Stranded Praos “Up To” People Trained by the Sea Stream: A Study about the Maritime Oral Tradition as a Source in the Writing about the Migration History in the Region of the Sawu Sea in the Lesser Sunda Islands. *Journal of Maritime Studies and National Integration*, 1(2), 78-94.
- Pradjoko, D., & Kartika, F. I. (2014). *Pelayaran dan Perdagangan Kawasan Laut Sawu: Abad ke-18 Awal Abad ke-20*. Jakarta: Wedatama Widyasastra.
- Ricklefs, M. C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004 (Third)*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Rudiany, N. P., & Lubis, F. R. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Qatar untuk Mengakhiri Keanggotaan dalam OPEC pada Tahun 2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(1), 103-118. <https://doi.org/10.20473/jhi.v13i1.18136>
- Setianto, Y. (2010). Birokrasi Tradisional di Jawa dalam Perspektif Sejarah. *Paramita: Historical Studies Journal*, 20(2), 169-177.
- Simatupang, H. Y., Oktaviani, J., & Novialdi, R. (2023). Indonesian AID: Media Diplomasi Indonesia sebagai New Emerging Country. *Power in International Relations*, 8(1), 55- 67.
- Starr, H. (1993). Review of Review of Grand Strategies in War and Peace, by P. Kennedy. *The American Political Science Review*, 87(1), 261-261. <https://doi.org/10.2307/2939032>
- Steenbrink, K. A., & Aritonang, J. S. (2008). Old and New Christianity in the Southeastern Islands. Dalam K. A. Steenbrink & J. S. Aritonang (Eds.), *A History of Christianity in Indonesia* (hlm. 229-344). Leiden: Brill.
- Strassler, R. (2008). *The Landmark Thucydides: A Comprehensive Guide to the Peloponnesian War*. New York: Simon and Schuster.
- Sucipto, H., & Puspitasari, M. (2016). Pengaruh Penanaman Modal Asing, Utang Luar Negeri Pemerintah, dan Keterbukaan Perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 6(1), 36-53. <https://doi.org/10.35448/jequ.v6i1.4161>
- Surya, R. A., & Puji, R. P. N. (2024). The Geopolitics of Java in the 17th Century: A Case Study of Mataram Sultanate. *Paramita: Historical Studies Journal*, 34(2), 243-259. <https://doi.org/10.15294/paramita.v34i2.47748>
- Sutrisno, Yuningsih, N. Y., & Agustino, L. (2018). Komparasi Teori Marketing Politik 4p menurut Niffenegger dan 3p menurut Adman Nursal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 6(2), 106-111. <https://doi.org/10.31289/jppuma.v6i2.1617>
- Suwitha, I. P. G. (2024). Bali Mini Empire: Dynamics of Gelgel Kingdom as Maritime Kingdom in 16th-17th Century. *International Journal of Social Sciences and Humanities*, 8(1), 11-21. <https://doi.org/10.53730/ijssh.v8n1.14868>
- Vatter, E. (2015). *Ata Kiwan (Cetakan II)*. Flores: Penerbit Nusa Indah.
- Villiers, J. (1994). The Vanishing Sandalwood of Portuguese Timor. *Itinerario*, 18(2), 86-96. <https://doi.org/10.1017/S0165115300022518>
- Wey, A. L. K., & Harun, A. L. (2018). Grand Strategy of the Malacca Sultanate, 1400-1511. *Comparative Strategy*, 37(1), 49-55. <https://doi.org/10.1080/01495933.2017.1419726>
- Widyatmaka, M. (2014). *Cendana dan Dinamika Masyarakat Nusa Tenggara Timur*. Yogyakarta: Ombak.
- Wijaya, D. N. (2022). *Malacca Beyond European Colonialism (15th-17th Centuries)*. Porto: Universidade do Porto.
- Wolters, O. W. (1967). *Early Indonesian Commerce: A Study of the Origins of Srivijaya*. New York: Cornell University Press.
- Wulandari, P. K. (2020). Strategi Raya Sriwijaya dan Melaka. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 159-166. <https://doi.org/10.17977/um019v5i1p159-166>
- Yoseph, M. P. (2010). *Identifikasi Citra Fisik Kota Larantuka Kabupaten Flores Timur Berdasarkan Budaya Portugis*. Malang: Institut Teknologi Nasional Malang.